

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia merupakan salah satu perekonomian terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil (Kusnandar, 2022). Hal ini didukung dengan perkembangan sektor bisnis dan keuangan di Indonesia yang pesat, termasuk mengadopsi teknologi yang didukung oleh pemerintah untuk mendorong transformasi sistem pembayaran digital. Sebelumnya, transaksi dilakukan menggunakan uang tunai maupun kartu kredit telah berkembang menjadi instrumen pembayaran yang lebih praktis menggunakan media elektronik (Lathifa, 2022). Tren penggunaan pembayaran digital merupakan cerminan dari adopsi teknologi yang semakin luas di masyarakat Indonesia. Dalam pengoptimalannya dibutuhkan perangkat yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat sehari-hari, seperti *smartphone*.

Ponsel pintar (*Smartphone*) menjadi perangkat vital dalam proses pembayaran digital. *Smartphone* merupakan peluang sebagai saluran pengiriman untuk layanan keuangan digital mampu untuk menghubungkan antar individu (Sekarsari, 2021). Didukung dengan *statement* Steve Mott pada kanal *World Bank* tahun 2018 yang menyatakan, bahwa sebagian besar masyarakat dalam kategori remaja secara intuitif melakukan aktivitas pembelian produk dengan *smartphone* mereka. Hal ini disebabkan mereka lebih terbiasa dengan penggunaan perangkat teknologi dalam bertransaksi. Oleh karena itu, melakukan transaksi menggunakan pembayaran digital menjadi dorongan kuat bagi masyarakat dengan kemudahan akses keuangan mereka dimana saja dan kapan saja serta memberikan kenyamanan bagi pemilik saat melakukan transaksi-transaksi bernilai kecil (Sihaloho, 2020).

Sistem pembayaran digital yang berkembang di Indonesia menciptakan kebutuhan akan standar yang lebih terpadu untuk memfasilitasi transaksi yang mudah dan cepat (Bank Indonesia, 2022). Namun, dengan penggunaan *e-wallet* yang mengharuskan pelanggan untuk memindai *QR Code* yang berbeda-beda

memicu Bank Indonesia melakukan inovasi dalam pengembangan sistem pembayaran digital (Azhari, 2021).

Sejak 1 Januari 2020, BI menerapkan regulasi terkait *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 22/10/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Peraturan tersebut menetapkan standar QRIS yang mengintegrasikan berbagai sistem QR sebelumnya menjadi satu kode QR yang dapat digunakan oleh semua penyedia layanan sistem pembayaran. QRIS bertujuan untuk memastikan kemudahan interoperabilitas antara berbagai penyedia jasa sistem pembayaran, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank, dalam melakukan transaksi dengan satu kode QR. Peraturan ini juga mengatur mengenai aplikasi dompet digital, yang harus terhubung ke QRIS agar dapat bertransaksi di seluruh kegiatan usaha yang menggunakan QRIS (Bank Indonesia, 2020). Artinya, pengguna harus memiliki uang elektronik ataupun dompet digital untuk memaksimalkan penggunaan QRIS. Berikut perkembangan uang elektronik dalam mendukung digitalisasi perekonomian di Indonesia.

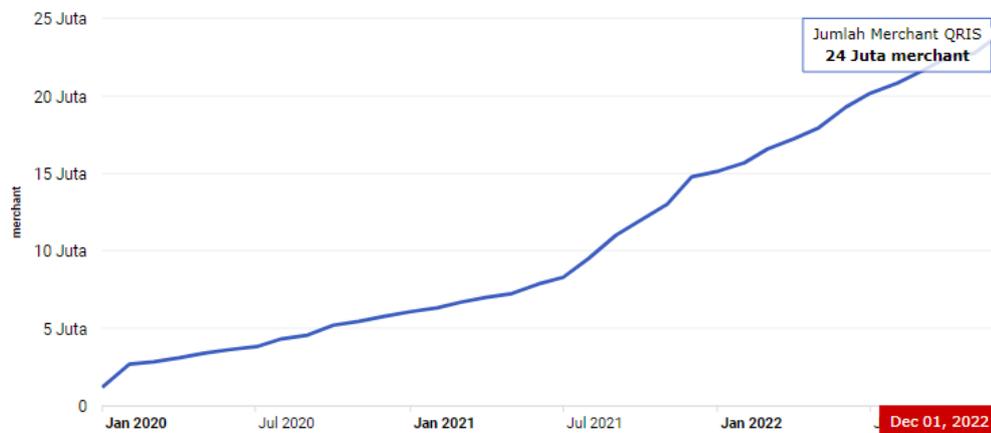
Tabel 1. Transaksi Uang Elektronik di Indonesia Tahun 2018 – 2022

Periode	Nominal (Dalam Jutaan Rupiah)	Volume (Dalam Satuan Transaksi)
2018	47.198.616	2.922.698.904
2019	145.165.468	5.226.699.919
2020	204.909.170	4.625.703.561
2021	305.435.828	5.451.471.374
2022	407.534.241	6.925.777.553

Sumber: Bank Indonesia, 2023

Dengan penggunaan uang elektronik yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir dalam **Tabel 1.** mewujudkan visi kedua Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yaitu mendorong perkembangan transformasi keuangan digital yang dapat terjadi secara *real time*. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan volume transaksi sekitar 600,996,358 akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, situasi ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020, dengan angka pertumbuhan negatif sekitar 2,1%. Meskipun demikian, Bank Indonesia telah

melakukan upaya untuk memulihkan penggunaan QRIS yang mengakibatkan peningkatan volume transaksi pada tahun 2021.



Sumber: databoks.katadata.co.id

Gambar 1. Jumlah *Merchant* QRIS di Indonesia

Berdasarkan gambar di atas, disimpulkan bahwa perkembangan QRIS pada *merchant* meningkat dari Januari 2020 – Desember 2022. Menurut catatan Bank Indonesia hingga bulan Juni 2023 juga terdapat sekitar 26,7 juta *merchant* yang menggunakan QRIS, dan jumlah pengguna QRIS mencapai 37 juta orang. Jumlah ini sudah mencapai 82% dari target total pengguna sebesar 45 juta pada tahun 2023. Dengan grafiknya yang terus naik, diharapkan penggunaan QRIS bermanfaat bagi para penggunanya.

Terdapat penelitian terdahulu terkait dengan implementasi QRIS seperti penelitian Carera *et al.* (2022) yang menyimpulkan bahwa dengan penggunaan QRIS omset pada *merchant* meningkat signifikan. Pendapatan penjualan rata-rata sebelum memanfaatkan QRIS mencapai Rp31.570.000 dan meningkat menjadi Rp44.200.000 setelah mengimplementasikan QRIS. Artinya, kenaikan omset ini tidak terkait dengan inflasi harga di Purwokerto pada tahun 2022 yang mencapai 0,67% untuk sektor makanan, minuman, dan tembakau (BPS, 2022). Dengan kata lain, terdapat faktor lain yang mendorong peningkatan penggunaan QRIS, dan itulah yang menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang tidak mengidentifikasi faktor-faktor sebenarnya yang memengaruhi omset penjualan dengan penggunaan QRIS.

Desire Dina Syaffa, 2024

PERKEMBANGAN TRANSFORMASI PEMBAYARAN DIGITAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DI WILAYAH MAJALENGKA.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Sekarsari *et al.* (2021) yang dilakukan di wilayah Surakarta dengan melibatkan Bank Indonesia Solo dan pedagang di daerah tersebut. Data penelitian menunjukkan bahwa adopsi QRIS oleh para pedagang di Surakarta mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 276% selama tahun 2020. Faktanya, tahun 2020 adalah tahun yang mengalami perubahan signifikan dalam perilaku konsumen dan kebijakan pemerintah terkait pembayaran digital. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami resesi ekonomi akibat pandemi sebesar -1,1% - 0,2% ([bbc.com](https://www.bbc.com)). Oleh karena itu, penelitian ini nantinya akan mengeksplorasi lebih lanjut terkait dengan penggunaan QRIS setelah pemulihan ekonomi di Indonesia.

Dalam penelitian Lomi *et al.* (2021) mencatat bahwa meskipun sistem pembayaran berbasis QRIS telah tersedia, tetapi kesadaran dan penggunaan masyarakat belum sepenuhnya optimal dalam bertransaksi di berbagai tempat usaha. Terdapat hambatan yang dihadapi masyarakat dalam penggunaan QRIS BCA antara lain, masalah sinyal yang tidak stabil, minimnya sosialisasi tentang QRIS, kerusakan barcode QRIS, dan belum semua *merchant* menerapkan QRIS. Sehingga, dalam penelitian ini nantinya akan membahas bagaimana dampak tersebut teratasi oleh *merchant* dalam mendukung keberlanjutan usahanya.

Dari ketiga penelitian di atas, menampilkan hasil yang berbeda-beda dengan tantangannya masing-masing dalam penggunaan QRIS. Namun, apakah kebermanfaatan dan kendala tersebut dirasakan pada seluruh *merchant* di lokasi yang berbeda? Berdasarkan pada data survei Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jawa Barat menyatakan, Kabupaten Majalengka sebanyak 5.841 *merchant* menggunakan QRIS dalam kegiatan usahanya (Jupri, 2020). Banyaknya *merchant* yang menggunakan QRIS menunjukkan perkembangan yang positif dalam adopsi QRIS di wilayah Majalengka. Ini menandakan peningkatan penggunaan teknologi pembayaran digital di kalangan para *merchant* di Kabupaten Majalengka.

Untuk memahami apakah para *merchant* benar-benar menggunakannya secara efektif, peneliti melakukan pra-riset dengan 3 informan dalam skala bisnis yang berbeda, sebagai berikut.

“Pembeli di sini (Majalengka) masih banyak pake cash dari yang masih sekolah sampe yang kerja, teh ... yang sekolah mungkin belum punya saldo atm (ketawa malu-malu).” – Alarastu

Teh Alarastu (penjual bolu) menyampaikan bahwa sebagian besar pembeli di Majalengka lebih memilih menggunakan uang tunai, dari pelajar hingga pekerja. Dalam pernyataannya, teh Alarastu menganggap bahwa salah satu alasan pelanggan tidak menggunakan QRIS karena mereka (anak sekolah) belum memiliki akses penuh ke layanan perbankan digital seperti ATM. Fenomena ini pun didukung oleh 2 informan lainnya terkait dengan penggunaan QRIS pada *merchant* mereka.

“Yang kaya gitu (e-wallet dan mbanking) masih jarang teh, kebanyakan yang pakai pekerja-pekerja gitu. Tapi yang kerja juga masih suka pake cash buat belanja atau jajan jadi kadang pake QRIS suka ga dipake.” – Abdul

“Kita punya QRIS buat bayar-bayar begitu, tapi ga suka dipake. Orang-orang di sini bayarnya pakai uang, jadi mending disimpen saja” – Dwi

Aa Abdul (penjual bubur soto) menjelaskan bahwa penggunaan layanan pembayaran digital seperti *e-wallet* dan *mbanking* terbilang jarang. Lebih lanjut, aa Abdul mengamati bahwa meskipun beberapa pekerja menggunakan metode pembayaran digital, tetapi kebanyakan dari mereka yang bekerja memilih menggunakan uang tunai untuk belanja atau jajan. Di sisi lain, menurut teh Dwi (penjual ayam geprek), meskipun mereka menyediakan layanan QRIS untuk pembayaran, tetapi mayoritas dari mereka masih melakukan pembayaran konvensional, dan menurut teh Dwi, lebih baik menyimpan QRIS tersebut karena merasa kurang diminati.

Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan sementara bahwa meskipun terdapat infrastruktur pembayaran digital, masyarakat Majalengka tidak terbiasa dengan perkembangan teknologi terkait dengan pembayaran digital. Fakta ini dibuktikan dengan perilaku masyarakat Majalengka yang lebih mengutamakan penggunaan uang kertas sebagai alat pembayaran yang praktis dan efisien dalam aktivitas transaksi mereka sehari-hari. Mereka lebih memilih cara tradisional yang akan dibayar secara langsung tanpa harus

membawa atau menggunakan *smartphone* yang mempengaruhi para *merchant* untuk tidak menggunakan QRIS dalam kegiatan usahanya.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena *statement-statement* yang muncul dari peristiwa tersebut memberikan dorongan untuk memahami dan menganalisa lebih dalam tentang penggunaan QRIS. *Statement-statement* ini mencerminkan berbagai persepsi, pengalaman, dan pemahaman yang dimiliki oleh *merchant* terkait dalam konteks penggunaan QRIS. Dengan dilakukannya penelitian ini, akan lebih jelas sejauh mana QRIS telah memberikan dampak dalam perkembangan pembayaran digital dan pengelolaan keuangan pada *merchant* di wilayah Majalengka.

1.2 Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada bagaimana penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat transaksi pembayaran dapat berkembang dan pengelolaan keuangan pada setiap sektor *food and beverage* di wilayah Majalengka, kecamatan Cigasong. Penelitian ini difokuskan pada lingkup usaha mikro dan usaha kecil sebagai bentuk legalitas badan usaha yang berfokus terhadap produksi, distribusi, serta penjualan makanan dan minuman untuk konsumsi masyarakat sehingga dapat mengidentifikasi data yang memiliki relevansi dan data yang tidak relevan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas adalah bagaimana implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan pengelolaan keuangan di sektor *food and beverage* wilayah Majalengka?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami atau mengeksplorasi implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dan pengelolaan keuangan pada sektor *food and beverage* di wilayah Majalengka.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai bahan referensi dan studi tentang pengelolaan keuangan sektor *food and beverage* setelah mengimplementasikan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian bagi masyarakat diharapkan dapat mendorong implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* di masyarakat dalam transaksi keuangan.

b. Bagi UMKM

Hasil penelitian bagi UMKM ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan penggunaan QRIS pada *food and beverage* sehingga pengelolaan keuangan dapat terjalin lebih efektif dan efisien.